

## KOLABORASI MULTI AKTOR DALAM PENGENTASAN WILAYAH BLANKSPOT DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

**Annisa Aulia Putri<sup>1</sup>, Syamsurizaldi<sup>2</sup>, Firdaus Firman<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Andalas, <sup>2,3</sup>Kabupaten Solok Selatan

Email: annisaauliaputri@soc.unand.ac.id

### ABSTRACT

Solok Selatan Regency is one of the areas that once had the status of a 3T area in West Sumatra Province, where there are still many blindspot areas. To be able to level the telecommunication network, the Government of Solok Selatan Regency cooperates with various parties, including through Nagari-Owned Enterprises, PT Indonesia Comnet Plus or Icon+, as well as the Nagari Government and community groups in the Nagari. From several previous studies, it appears that collaboration makes a major contribution to the development of a region. Departing from these previous research studies, the researcher is interested in studying further related to multi-actor collaboration in alleviating blindspot areas in Solok Selatan Regency. This research is a type of qualitative research with descriptive analysis. The data source is the actors involved in alleviating blind spot areas in Solok Selatan Regency. Data collection through interviews and documentation as well as observation. The results showed that the actors involved in alleviating blankspot areas in Solok Selatan Regency were the Government of South Solok Regency (Diskominfo), PT Indonesia Comnet Plus (Icon+), Nagari Government and BUMNag. There are many benefits to be gained if this collaboration can run optimally in all villages which are included in blind spot areas. In addition, the distribution of telecommunication networks in South Solok Regency can also have a positive impact on increasing the quality of public services in South Solok Regency.

Keyword: *Collaboration, Multi Actor, Blakspot*

### INTRODUCTION

Kehidupan masyarakat modern saat ini tidak bisa dilepaskan dari internet. Internet memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan manusia, yang mana dapat meningkatkan efektifitas, produktivitas, serta memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Bahkan saat ini, internet telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, dimana segala aktivitas yang dilakukan menggunakan internet. Contohnya pembayaran, pendaftaran pelayanan, surat menyurat, dan sebagainya. Perkembangan teknologi ini juga membuat Pemerintah harus ikut berkembang. Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem luar jaringan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga harus mampu memberikan pelayanan dalam jaringan (*on-line*). Adanya jaringan telekomunikasi akan membuat pemerintah mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan terintegrasi.

Saat ini jaringan telekomunikasi sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada daerah-daerah tertentu penyebaran jaringan telekomunikasi ini masih belum merata. Hal ini tentu berdampak terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat. Selain berdampak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat, tidak adanya jaringan telekomunikasi pada suatu wilayah juga berdampak terhadap ketertinggalan wilayah tersebut dari berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Akses informasi yang sangat cepat melalui jaringan telekomunikasi yang tidak dapat dijangkau pada wilayah blindspot menyebabkan masyarakat tidak mengetahui informasi dari luar wilayahnya.

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang pernah berstatus sebagai daerah 3T di Provinsi Sumatera Barat, dan saat ini masih terdapat banyak wilayah blindspot. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 81 titik blankspot di 22 Nagari di Kabupaten Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Titik Blankspot di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Titik Blankspot (Jorong/Dusun)	Jumlah Nagari	Jumlah Nagari Blankspot
1.	Koto Parik Gadang Diateh	14	4	3
2.	Sungai Pagu	0	11	0
3.	Pauh Duo	8	4	3
4.	Sangir	11	4	3
5.	Sangir Jujuan	11	5	4
6.	Sangir Balai Janggo	12	4	4
7.	Sangir Batang Hari	19	7	5
	Jumlah	85	39	22

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Solok Selatan (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 1 tergambar bahwa pada tahun 2020 masih terdapat 85 titik blankspot (jorong/dusun) atau 31% dari 275 jorong/dusun dan berada pada 22 Nagari atau 56% dari 39 Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Satu-satunya kecamatan yang terlepas dari titik blankspot yaitu Kecamatan Sungai Pagu, dimana di Kecamatan Sangir yang merupakan Ibukota Kabupaten masih terdapat 11 titik blankspot pada 3 Nagari. Berbagai Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bersama pemerintah pusat pada tahun 2021-2022 maka pada akhir tahun 2022 masih terdapat 39 titik blankspot (jorong/dusun) atau 15 % dari total 275 jorong/dusun di Kabupaten Solok Selatan. Untuk dapat meratakan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan terus kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya melalui Badan Usaha Milik Nagari, PT Indonesia Comnet Plus atau Icon+, serta Pemerintah Nagari dan kelompok masyarakat yang ada di Nagari.

Penyediaan jaringan telekomunikasi ini akan dapat terwujud jika semua aktor tersebut saling berkolaborasi satu sama lain dan menjalankan perannya sesuai dengan yang semestinya. Kolaborasi merupakan salah satu konsep yang saat ini umum diterapkan dalam pemerintahan. Sesuai dengan perkembangan keilmuan administrasi publik, kajian dalam penelitian ini memfokuskan pada kolaborasi yang dilakukan oleh banyak aktor dalam upaya pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan. Secara khusus penelitian ini ingin menjawab bagaimana bentuk kolaborasi dari aktor-aktor pemerintah dan non pemerintah dalam penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah-wilayah yang tidak tersedia sinyal telekomunikasi. Hal ini menarik dilakukan, sebagai bagian dari kajian *New Public Governance* di tingkat lokal.

Ulum dan Anggraini (Ulum & Anggraini, 2020) menyatakan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dapat melibatkan bukan saja pemerintah sebagai single actor dalam pengambilan, pelaksanaan, atau evaluasi keputusan, namun juga menghendaki kesetaraan peran antara

stakeholder. Berdasarkan konsep tersebut, pemerintah bukanlah satu-satunya pelaku, namun merupakan salah satu pelaku dan bukan menjadi pelaku yang paling menentukan. Konsep ini digunakan oleh beberapa peneliti untuk melihat interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan aktor lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Pujiyono (Pujiyono, 2022) tentang Kolaborasi Multi Aktor dalam Pengelolaan Wisata Geopark Belitung menemukan bahwa terdapat berbagai aktor, baik unsur pemerintah, swasta, dan komunitas memiliki kontribusi yang besar. Tiap lembaga melakukan kerja sama, komunikasi, dan koordinasi sehingga membangun kolaborasi yang baik.

Penelitian dari Saputra dan Ulum (Saputra & Ulum, n.d.) tentang peran multi aktor dalam pemberdayaan petani kopi berbasis pentahelix juga menemukan bahwa adanya kolaborasi pentahelix antara aktor pemerintah dan non pemerintah membuat pemberdayaan secara keseluruhan mampu memberikan perubahan pada aktivitas petani dimulai dari proses bertani budidaya, pasca panen, dan pemasaran menuju tatanan yang lebih baik.

Dari beberapa penelitian terdahulu (Aeni & Astuti, 2019; Ansell & Gash, 2008; Bila & Saputra, 2019; Firmansyah et al., 2022; Pujiyono, 2022; Sambodo & Pribadi, 2016; Saputra & Ulum, n.d.; Ulum & Anggraini, 2020), terlihat bahwa kolaborasi memberikan kontribusi besar pada perkembangan suatu daerah. Berangkat dari kajian penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut terkait kolaborasi multi aktor dalam pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan bentuk kolaborasi antar aktor dalam pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan.

### ***Collaborative Governance***

Sesuai dengan perkembangan keilmuan administrasi publik yang dimulai sejak akhir abad ke 18, saat ini terdapat konsep baru, yaitu *New Public Governance* (NPG) yang merupakan peralihan dari konsep *New Public Service*. NPG merupakan topik dengan akar intelektual terkuat di Administrasi Publik saat ini yang memfokuskan pada kajian kolaborasi dan tata kelola di antara jaringan aktor (Vogel & Hattke, 2022). Pendekatan ini mengusulkan model baru dimana banyak state-actor dan nonstate-actor saling berkontribusi untuk memberikan layanan publik, melalui jaringan, kemitraan, dan kolaborasi (Osborne, 2006).

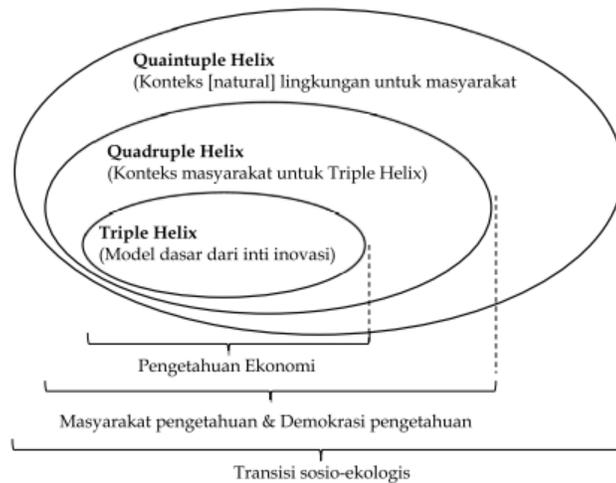
Governance merujuk pada penertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata menjadi urusan pemerintah. Governance lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi governing yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan institusi atau aktor lain (Malau, 2013). Istilah governance berbeda dengan government, yang hanya merujuk pada subjek “pemerintah” saja. Governance mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan (Sedarmayanti, 2004).

Konsep Governance ini merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Syamsurizaldi et al., 2019). Artinya, semua masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan keinginan mereka, menggunakan hak hukum dan pemerintah menjadi jebatan dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka.

## Kolaborasi Multi Aktor

Proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara saat ini tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai single actor dalam pengambilan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan, namun juga menghendaki kesetaraan peran antara stakeholder (Saputra & Ulum, n.d.). hal ini berimplikasi pada peran pemerintah dalam pembangunan yang beralih menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain untuk ikut serta dalam upaya tersebut.

Terdapat beberapa perkembangan model kolaborasi ini yang bisa dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Knowledge Production and Innovation. Sumber: (Cai & Lattu, 2022; Carayannis et al., 2012)

Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat perkembangan kolaborasi, mulai dari *triple helix*, *Quadruple Helix*, dan terakhir *Quintuple Helix*. model dasar *triple helix* berfokus pada hubungan universitas-industri-pemerintah (Etzkowitz, n.d.). Sedangkan model kolaborasi *Quadruple Helix* merupakan model inovasi yang mengembangkan model *Triple Helix* dengan menempatkan masyarakat sebagai user dari output kolaborasi dan sinergi ketiga aktor yang ada pada *triple helix*, bahkan pada beberapa literatur, *Quadruple Helix* ini menempatkan pihak yang dikatannya sebagai masyarakat sipil berbasis media dan budaya (Carayannis et al., 2012). Selanjutnya, *Quadruple Helix* dikembangkan menjadi *Quintuple Helix Innovation* yang menambahkan helix kelima yaitu dengan memasukkan lingkungan sosial yang menekankan ekologi sosial yang adaptif dengan kondisi saat ini. tujuan akhirnya adalah meningkatkan ekonomi dan menciptakan sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, masyarakat dan lingkungan sosial.

Penelitian ini selanjutnya akan mengidentifikasi lebih jauh kolaborasi yang dilakukan oleh banyak aktor dalam pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan. Kegiatan ini melibatkan banyak aktor dan dibutuhkan sinergitas masing-masing aktor agar tujuan dapat tercapai.

## RESEARCH METHODS

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu aktor yang terlibat dalam pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan. Adapun fokus penelitian ini adalah melihat dan mengidentifikasi aktor-aktor serta keterlibatan mereka dalam pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan. Sumber data berupa wawancara dengan aktor yang terlibat, serta dokumen-dokumen yang menunjukkan keterlibatan aktor tersebut.

## DISCUSSION

### Kondisi Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan merupakan satu dari tiga kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 bersama Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya. Peresmian keberadaan tiga Kabupaten baru ini melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat. Selama 19 tahun, Kabupaten Solok Selatan masih terus berbenah untuk dapat menjadi Kabupaten yang maju. Posisi Kabupaten Solok Selatan terletak di ujung Selatan Kabupaten Solok sekaligus ujung Selatan Provinsi Sumatera Barat, serta diperparah dengan kondisi hanya ada satu ruas jalan menuju daerah ini membuat Kabupaten Solok Selatan pernah berstatus sebagai salah satu daerah 3T di Provinsi Sumatera Barat (2005-2019).

Kabupaten Solok Selatan memiliki luas 3.590,15 km<sup>2</sup>. Dengan luas tersebut, Kabupaten Solok Selatan menempati posisi ke-7 dari kabupaten dan kota terluas di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah yang luas ini memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih kurang 50 jiwa/km<sup>2</sup>, namun penyebaran penduduk tidak merata pada setiap kecamatan. Pusat pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan terdapat di Padang Aro, sedangkan pusat perekonomian terdapat di Muara Labuh.

Kondisi wilayah yang luas dan penyebaran tidak merata tersebut membuat Pembangunan di Kabupaten Solok Selatan kurang merata, termasuk jaringan telekomunikasi. Pada daerah yang padat penduduk dan daerah pusat pemerintahan, jaringan telekomunikasi sudah baik. Namun pada daerah-daerah yang jarang penduduk, masih banyak terdapat wilayah blankspot. Selain faktor kepadatan penduduk, kondisi wilayah Kabupaten Solok Selatan turut mempengaruhi masih terdapatnya banyak blankspot. Wilayah kabupaten Solok Selatan didominasi pegunungan bukit barisan. Daratan yang dijadikan pemukiman berada sepanjang Lembah barisan bukit dan pegunungan. Titik tertinggi berada pada 3.805 meter di atas permukaan laut, yaitu gunung kerinci yang menjadi batas antara Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci. Bentang alam Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari perbukitan dan Lembah-lembah ini menjadikan akses menuju pemukiman agak susah dan tidak aksesibel. Sehingga untuk jaringan telekomunikasi sendiri juga sulit masuk ke daerah perkampungan warga. Kondisi lainnya yang menyebabkan masih banyak blankspot adalah kesadaran penduduk akan pentingnya jaringan telekomunikasi di daerah juga kurang. Hal ini dikarenakan Masyarakat yang masih hidup sederhana, berbeda dengan daerah padat penduduk seperti Muara Labuh. Oleh karena itu program pengentasan wilayah blindspot ini dilakukan untuk meratakan Pembangunan di Kabupaten Solok Selatan, yang nantinya berfungsi untuk meningkatkan potensi ekonomi dan sosial Masyarakat.

Pengentasan wilayah blankspot menjadi tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok Selatan. Dilihat dari kinerja Diskominfo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020, berdasarkan indikator kinerja untuk mendukung pelayanan publik, perkembangan komunikasi dan informatika dan cakupan layanan telekomunikasi masih kurang maksimal. Sampai tahun 2020, hanya terdapat 9 OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Layanan Publik dan untuk cakupan layanan telekomunikasi baru 83,28% yang dilayani oleh 3 Provider (dengan jumlah Kawasan pemukiman yang termasuk Blank Spot Area sebanyak 46 Jorong). Sedangkan untuk PDRB sektor informasi dan komunikasi cenderung mengalami pelambatan pertumbuhan dari 11,78% pada tahun 2017 menjadi 7,44% di tahun 2020.

Data ini menunjukkan belum maksimalnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan Pembangunan jaringan telekomunikasi. Hal ini terlihat dari masih adanya 16, 72% wilayah blankspot di kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2020. Kondisi ini menjadi penyebab belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi baik antar dinas, sampai pada tingkat Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

### **Kolaborasi Multi Aktor dalam Pengentasan Wilayah Blindspot di Kabupaten Solok Selatan**

Kondisi Kabupaten Solok Selatan yang dijelaskan pada sub bab di atas menjadi alasan kenapa diperlukannya program-program pengentasan wilayah blankspot serta Pembangunan pemancar BTS (*Base Transceiver Station*). Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi beberapa aktor yang terlibat, yaitu :

#### *Pemerintah Kabupaten Solok Selatan*

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi aktor kunci dalam pengentasan wilayah blankspot di Kabupaten Solok Selatan. Untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan, Pemkab harus Menyusun tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan. Pengentasan wilayah blankspot di Kabupaten Solok Selatan masuk ke dalam visi 3 Kabupaten Solok Selatan, yaitu penguatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan melayani. Dari misi tersebut, ditetapkan tujuan yaitu “terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Sasarannya adalah “meningkatkan tata Kelola pemerintahan berbasis elektronik”(Diskominfo Kabupaten Solok Selatan, n.d.). Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut, Diskominfo Kabupaten Solok Selatan menetapkan Strategi dan Arah kebijakan untuk Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Peningkatan layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah
3. Peningkatan penggunaan dan pengelolaan berbagai aplikasi TI pada layanan pemerintah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik
5. Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informasi publik melalui media website, media social, radio, dan media lainnya
6. Mewujudkan keamanan informasi pemerintah daerah
7. Peningkatan pengembangan layanan keamanan informasi
8. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta SDM persandian dan keamanan informasi
9. Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral

10. Menyediakan data sektoral Kabupaten Solok Selatan yang cepat, tepat, dan valid

Pengentasan wilayah blank spot di Kabupaten Solok Selatan masuk ke dalam urusan komunikasi dan informasi Diskominfo. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mampu menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk dengan pihak PT. PLN Icon +.

Dalam hal ini, peran Diskominfo adalah mendorong dan melakukan kerjasama dengan Icon+ untuk membangun jaringan internet, yang mana tidak hanya terhubung dengan berbagai kantor-kantor pemerintahan di pusat ibukota, tetapi juga menjangkau hingga seluruh Puskesmas, Kantor-Kantor Wali Nagari, serta beberapa sekolah setingkat SLTP yang tersebar di berbagai titik-titik blankspot. Selanjutnya, jaringan internet yang sudah tersedia di berbagai kantor wali nagari di daerah blankspot tersebut, diharapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui skema usaha bersama penjualan pulsa/paket data yang dikelola oleh Bumnag bekerjasama dengan pihak PT.PLN Icon Plus.

### **PT Indonesia Comnet Plus (Icon+)**

Icon+ merupakan salah satu anak Perusahaan PT PLN (Persero). Dalam mengatasi wilayah blindspot, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menjalin kerja sama dengan Icon+, dimana Icon+ menjadi penyedia jaringan pada titik daerah yang tidak tercover sinyal telekomunikasi, yang mencakup pengadaan jaringan, pengembangan, serta pemeliharaan jaringan telekomunikasi. PT Icon+ kemudian menyediakan sarana dan metode kerja sama dengan pemerintah Nagari serta BUMNag di daerah sulit sinyal. Kerjasama pertama dilakukan dengan Pemerintahan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Selain menjadi tambahan pendapatan, penyediaan jaringan telekomunikasi ini juga dapat mengatasi wilayah-wilayah blindspot, sehingga Pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan dapat merata.

Icon+ menjadi pilihan Pemkab dalam kerjasama pengentasan blankspot dikarenakan kemampuannya dalam membangun infrastruktur telekomunikasi internet secara lebih cepat dan lebih murah. Hal ini dikarenakan jaringan kabel yang mereka bangun tersambung dari satu tiang PLN ke tiang PLN lainnya, dan tidak membutuhkan tiang-tiang tersendiri.

### **PT Jaringan Teman Sejati (PT JTS)**

Salah satu pihak swasta yang terlibat dalam pengentasan wilayah blankspot di Kabupaten Solok Selatan Adalah PT Jaringan Teman Sejati (PT JTS). PT JTS merupakan *Internet Service Provider* (ISP) lokal yang membantu mendampingi pihak Bumnag dalam operasional teknis, pemasangan, dan pembuatan aplikasi keuangan agar pendapatan Bumnag dapat dilihat secara real time oleh pengelolanya. Sehingga BUMNag yang ada di Kabupaten Solok Selatan dapat mengelola keuangan berbasis teknologi jaringan, tidak lagi secara manual.

### **Pemerintahan Nagari dan BUMNag di Kabupaten Solok Selatan**

Pemerintah Nagari juga merupakan salah satu actor yang cukup penting dalam pengentasan blankspot ini. Daerah-daerah blankspot ini terdapat pada nagari-nagari yang berada di pelosok, dan sampai saat ini terdapat 39 blindspot yang tersebar di 6 Kecamatan se Kabupaten Solok Selatan. Pada

Kawasan-kawasan ini, masih minim infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan telepon, fax, free wifi. Salah satu penyebabnya adalah banyak nagari-nagari yang terdapat di daerah perbukitan, sehingga menyulitkan pendirian akses internet. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten harus bekerja sama dengan Pemerintah Nagari dalam mengatasi blankspot ini.

Kerjasama ini dapat dilakukan melalui BUMNag yang ada di Nagari. BUMNag pada daerah sulit sinyal bisa memanfaatkan kerja sama ini menjadi salah satu unit usaha. Adanya kerja sama ini dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan Masyarakat akan telekomunikasi, serta berpeluang besar dalam menghasilkan pendapatan bagi nagari.

Kerjasama Multi Aktor dalam pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan ini selain dapat menjadi solusi permasalahan Pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan, juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi nagari. Banyak manfaat yang didapatkan jika Kerjasama ini dapat berjalan dengan maksimal di semua nagari yang termasuk wilayah blindspot. Selain itu, dengan meratanya jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan juga bisa memberikan dampak positif pada meningkatnya kualitas layanan publik di Kabupaten Solok Selatan.

Dalam dua bulan berjalan (Juni dan Juli 2023), kerjasama Bumrag Pakan Rabaa Timur dengan PT.PLN Icon Plus tersebut telah melakukan instalasi jaringan internet hingga 70 rumah di nagari tersebut, dengan rentangan kabel hingga 6 Km. Dalam laporan pada awal Agustus 2023 kemarin, usaha tersebut berhasil meraup pendapatan hingga Rp 57 Juta lebih. Dan ini tentu diharapkan menjadi contoh dan motivasi bagi Bumrag lain untuk turut serta memanfaatkan peluang tersebut.

## CONCLUSION

Penyediaan jaringan telekomunikasi ini akan dapat terwujud jika semua aktor tersebut saling berkolaborasi satu sama lain dan menjalankan perannya sesuai dengan yang semestinya. Kolaborasi merupakan salah satu konsep yang saat ini umum diterapkan dalam pemerintahan. Kerjasama Multi Aktor dalam pengentasan wilayah blindspot di Kabupaten Solok Selatan ini selain dapat menjadi solusi permasalahan Pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan, juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi nagari. Banyak manfaat yang didapatkan jika Kerjasama ini dapat berjalan dengan maksimal di semua nagari yang termasuk wilayah blindspot. Selain itu, dengan meratanya jaringan telekomunikasi di Kabupaten Solok Selatan juga bisa memberikan dampak positif pada meningkatnya kualitas layanan publik di Kabupaten Solok Selatan.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal: pertama agar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kembali memperluas Kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi lainnya. Kedua, agar kerja sama BUMNag dengan Icon+ dapat dilakukan di berbagai BUMNag lain di daerah-daerah blackspot. agar masyarakat memiliki pilihan jaringan telekomunikasi yang diinginkan. Selain itu, memperluas kerja sama ini juga dapat meratakan Pembangunan jaringan telekomunikasi dan mengejar ketertinggalan daerah Kabupaten Solok Selatan di bidang telekomunikasi dan informasi.

## REFERENCE

Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan. *Conference on Public Administration and Society*, 01, 92-118.

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Collaborative Governance Strategy in Government Sector. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 09(02), 196–210.
- Cai, Y., & Lattu, A. (2022). Triple Helix or Quadruple Helix: Which Model of Innovation to Choose for Empirical Studies? *Minerva*, 60(2), 257–280. <https://doi.org/10.1007/s11024-021-09453-6>
- Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(1), 2. <https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2>
- Diskominfo Kabupaten Solok Selatan. (n.d.). *Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Solok Selatan 2021-2026*.
- Etzkowitz, H. (n.d.). *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation in Action*.
- Firmansyah, D., Suryana, A., Rifa'i, A. A., Suherman, A., & Susetyo, D. P. (2022). Hexa Helix: Kolaborasi Quadruple Helix Dan Quintuple Helix Innovation Sebagai Solusi Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 476–499. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.4602>
- Malau, H. (2013). Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat. In *TINGKAP: Vol. IX (Issue Th)*.
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? In *Public Management Review* (Vol. 8, Issue 3, pp. 377–387). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Pujiyono, B. (2022). Kolaborasi Multi Aktor dalam Pengelolaan Wisata Geo Park Belitung. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(1), 92–101. <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.3367>
- Sambodo, G. T., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 3 No.1(Februari), 1–30.
- Saputra, Y. A., & Ulum, C. (n.d.). *Peran Multi Aktor Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Berbasis Pentahelix Roles Of Multi Actors In Empowering Coffee Farmers Based On Pentahelix*.
- Sedarmayanti. (2004). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.
- Syamsurizaldi, Putri, A. A., & Antoni, S. (2019). Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 1, 99–121.
- Ulum, M., & Anggraini, N. L. (2020). *Community Empowerment*. UB Press.
- Vogel, R., & Hattke, F. (2022). A century of Public Administration: Traveling through time and topics. *Public Administration*, 100(1), 17–40. <https://doi.org/10.1111/padm.12831>